

Relevansi Mahasiswa Iain Palangkaraya Terhadap Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Membangun Masyarakat Berkeadilan

The Relevance Of Iain Palangkaraya Students Towards The Balance Of Rights And Duties Of Citizens In Building A Just Society

Florence Angelaila Fauzi¹, Zumiyyati Zumiyyati², Ulpia Rahim³, Ikrimah Ikrimah⁴

^{1,2,3,4} Institut Agama Islam Negeri, Palangka Raya

Korespondensi Penulis: flofauzi14@gmail.com

Article History:

Received: 19 Maret 2024

Accepted: 23 April 2024

Published: 30 Mei 2024

Keywords: Rights and Duties of Citizens, Relevance, Student.

Abstract: In the context of globalization and evolving social change, the role of students in creating a balance of rights and obligations of citizens and building a just society is becoming increasingly important. This study uses a qualitative method with a questionnaire as a data collection tool to explore students' views and practices related to their rights and obligations as citizens. Through the analysis of data obtained from respondents, this study aims to identify factors that influence the role of university students in creating a just and equitable society. The results show that students have great potential as agents of change in society. With their higher education and knowledge, students are able to influence positive changes in achieving a balance of rights and obligations of citizens. Students' active participation through social movements, advocacy activities, and civic education in higher education can help create a more just and equitable society. This research is expected to provide in-depth insight into how students can effectively become agents of change in building a more just and equitable society.

Abstrak

Dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial yang terus berkembang, peran mahasiswa dalam menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban warga negara serta membangun masyarakat berkeadilan menjadi semakin penting. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kuesioner sebagai alat pengumpulan data untuk mengeksplorasi pandangan dan praktik mahasiswa terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara. Melalui analisis data yang diperoleh dari responden, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peran mahasiswa dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Dengan pendidikan tinggi dan pengetahuan yang mereka miliki, mahasiswa mampu mempengaruhi perubahan positif dalam mencapai keseimbangan hak dan kewajiban warga negara. Partisipasi aktif mahasiswa melalui gerakan sosial, kegiatan advokasi, dan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana mahasiswa dapat efektif menjadi agen perubahan dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban Warga Negara, Relevansi, Mahasiswa.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan dinamika sosial yang terus berkembang, peran mahasiswa menjadi semakin penting dalam membentuk masyarakat yang berkeadilan. Sebagai mahasiswa, sudah seharusnya mengetahui apa hak dan kewajiban dirinya agar tidak 'tersesat'. Setiap kampus seharusnya memiliki peraturan sendiri tentang hak dan kewajiban mahasiswanya. Tetapi, hak dan kewajiban tersebut biasanya akan mendasar pada undang-

* Florence Angelaila Fauzi flofauzi14@gmail.com

undang tertentu. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan terus-menerus oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya (Fadila & Purba, 2021).

Bangsa Indonesia melihat hak tidak terlepas dari kewajiban. Baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat, mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan. Tiap hak mengandung kewajiban dan demikian pula sebaliknya. Kedua-duanya merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Negara kepulauan Indonesia yang menganut paham Negara Kesatuan menempatkan kewajiban di muka kepentingan umum masyarakat, bangsa, dan negara harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi atau golongan. (Sumarsono, 2001 : 98).

Pada dasarnya, keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara merupakan fondasi utama dalam konstruksi masyarakat yang berkeadilan. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri (Hartaka & Suadyana, 2020).

Hak-hak individu perlu dilengkapi dengan pemahaman akan kewajiban yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu masyarakat yang adil dan inklusif. Dalam konteks ini mahasiswa memiliki peran kunci dalam membawa perubahan positif melalui partisipasi aktif dalam kegiatan sosial, advokasi, dan pendidikan masyarakat tentang hak dan kewajiban.

Relevansi adalah konsep yang menggambarkan sejauh mana suatu informasi, tindakan, atau objek sesuai dengan kebutuhan, minat, atau tujuan tertentu dari individu atau kelompok. Dalam berbagai konteks, relevansi berfungsi sebagai penentu nilai kegunaan dan kepentingan dari sesuatu dalam situasi spesifik. Dalam konteks ini, relevansi merujuk pada sejauh mana tindakan, kontribusi, dan keterlibatan berbagai pihak, termasuk mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat umum, memiliki dampak nyata dan signifikan terhadap tercapainya keadilan sosial dalam masyarakat. Tindakan relevan adalah yang sesuai dengan prinsip keadilan, efektif dalam mengatasi ketidakadilan, dan mampu menghasilkan perubahan positif yang berkelanjutan.

Relevansi dengan keadilan adalah nilai keadilan merupakan sesuatu yang berharga dan berfungsi bagi manusia. Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang dan dalam arti kesamaan. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia. Keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan

hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Dalam konteks membangun masyarakat berkeadilan, hak dan kewajiban memiliki makna penting dan saling berkaitan untuk mencapai tujuan tersebut. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak. Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum dan lain sebagainya (Nafilah, 2020).

Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya (Johan Yasin, 2009).

A. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Dalam konteks Indonesia, hak warga negara terhadap negaranya telah diatur dalam undang-undang dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak-hak umum yang digariskan dalam UUD 1945. Diantara hak-hak warga negara yang dijamin dalam UUD adalah hak asasi manusia yang rumusan lengkapnya tertuang dalam pasal 28 UUD perubahan kedua. Dalam pasal tersebut dimuat hak-hak asasi yang melekat dalam setiap individu warga negara seperti hak kebebasan beragama dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya, bebas untuk berserikat dan berkumpul (pasal 28E), hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah, hak atas status kewarganegaraan (pasal 28E), dan hak-hak asasi manusia lainnya yang tertuang dalam pasal tersebut.

Sedangkan contoh kewajiban yang melekat bagi setiap warga negara antara lain kewajiban membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dengan warga, membela tanah air (pasal 27E), membela pertahanan dan keamanan negara (pasal 29E), menghormati hak asasi lain dan mematuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan pasal (28E), dan berbagai kewajiban lainnya dalam undang-undang. Adapun prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warga adalah terlibatnya warga secara langsung atau perwakilan dalam setiap perumusan hak dan kewajiban tersebut sehingga warga sadar dan menganggap hak dan kewajiban tersebut sebagai bagian dari kesepakatan mereka yang dibuat sendiri.

B. Hak-Hak Warga Negara

Adapun istilah yang berkaitan dengan hak-hak dasar yakni :

- Hak Kodrat
- Hak Asasi Manusia
- Hak-Hak Kebebasan Dasar Manusia
- Hak dan Kewajiban Asasi Warga Negara dalam konsep Natural Right maka hak adalah 'what is nature' hak tersebut sifatnya kodrati, dalam artian :
 - Kodratlah yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pendapat manusia
 - Setiap orang dilahirkan dengan hak tersebut
 - Hak tersebut dimiliki manusia dalam keadaan alamiah kemudian dibawahnya dalam kehidupan masyarakat.

Dalam Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 39/1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan, "hak asasi manusia adalah sebagai perangkat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib di hormati dan di junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam Pasal 28J ditentukan :

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengajuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi.

Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai pasal 34 UUD 1945. Beberapa hak warga negara Indonesia antara lain sebagai berikut :

- Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang baik
- Hak membela negara
- Hak berpendapat
- Hak kemerdekaan memeluk agama
- Hak mendapatkan pengajaran
- Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia
- Hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial
- Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial

- Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial

Selain itu ditentukan pula hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Hak dan kewajiban negara terhadap negara. Beberapa ketentuan tersebut, antara lain sebagai berikut :

- Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintah
- Hak negara untuk dibela
- Hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat
- Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil
- Kewajiban negara untuk hak asasi warga negara
- Kewajiban negara mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat
- Kewajiban negara memberikan jaminan sosial
- Kewajiban negara memberikan kebebasan beribadah

Pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 yang menetapkan hak dan kewajiban warga negara mencakup pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34.

- a) Pasal 27 ayat (1), menetapkan hak warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintah, serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.
- b) Pasal 27 ayat (2), menetapkan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- c) Pasal 27 ayat (3), dalam perubahan UUD 1945 menetapkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.
- d) Pasal 28 menetapkan hak kemerdekaan warga negaranya untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.
- e) Pasal 29 ayat (2), menyebutkan adanya hak kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya.
- f) Pasal 30 ayat (1), dalam perubahan kedua UUD 1945 menyebutkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- g) Pasal 31 ayat (1), bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

C. Kewajiban Warga Negara

Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau keharusan melaksanakannya. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di suatu negara mempunyai kewajiban sebagai warga negara. Berikut ini adalah kewajiban warga negara Indonesia :

- a) Wajib menaati hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
- b) Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945

menyatakan: “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”

- c) Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan: setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.
- d) Wajib tunduk kepada pembatasann yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat (2) mengatakan: “dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
- e) Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: “tiap-tiapwarga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Sebagai warga negara Indonesia kita tentu saja memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Namun apakah kita semua tahu apa saja yang layak kita peroleh dan apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara? Sebagai landasan konstitusional dan sumber dari undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945 memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasar kita sebagai warga negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memanfaatkan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Responden diminta untuk memberikan pendapat setuju atau tidak terhadap berbagai pernyataan yang dibuat oleh penulis mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hasil dari pengisian kuesioner ini sangat penting untuk menentukan apakah kebijakan saat ini sudah sesuai dengan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka.

Melalui analisis jawaban dari responden, penelitian ini berupaya menggali informasi mendalam mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merevisi atau menguatkan kebijakan yang ada guna meningkatkan kesadaran warga terhadap hak dan kewajiban mereka.

Penelitian ini melibatkan beberapa pernyataan yang dirancang untuk mengukur persepsi dan pemahaman mahasiswa tentang peran mereka dalam masyarakat. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing pernyataan :

- 1) Mahasiswa memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban warga negara dalam membangun masyarakat berkeadilan. Mahasiswa sebagai kaum intelektual memiliki wawasan luas dan kesadaran kritis terhadap isu-isu sosial. Peran mereka signifikan dalam mengadvokasi dan mempromosikan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, yang penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil.
- 2) Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perubahan dalam masyarakat terkait keseimbangan hak dan kewajiban warga negara. Mahasiswa seringkali menjadi agen perubahan sosial melalui berbagai aktivitas, seperti demonstrasi, advokasi, dan kampanye kesadaran, yang dapat mendorong perubahan kebijakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Partisipasi aktif mahasiswa dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Partisipasi aktif mahasiswa dalam berbagai kegiatan sosial dan politik dapat membantu menegakkan keadilan sosial dan memastikan bahwa semua warga negara menikmati hak-hak mereka secara adil.
- 4) Mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dalam memperjuangkan hak-hak warga negara yang terabaikan. Dengan pengetahuan dan akses mereka terhadap informasi, mahasiswa dapat mengidentifikasi dan memperjuangkan hak-hak kelompok yang terabaikan atau terpinggirkan dalam masyarakat.
- 5) Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan sosial dapat memperkuat keseimbangan hak dan kewajiban dalam masyarakat. Mahasiswa yang terlibat dalam gerakan sosial dapat mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban serta mendorong masyarakat untuk menghormati dan melaksanakan keduanya.
- 6) Mahasiswa dapat memainkan peran sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban. Mahasiswa seringkali berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, menyuarakan aspirasi masyarakat dan mengadvokasi kebijakan yang adil.
- 7) Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang berkeadilan. Sebagai individu yang terdidik, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menggunakan pengetahuan mereka demi kebaikan masyarakat, termasuk dalam memperjuangkan keadilan sosial.
- 8) Pendidikan tinggi memberikan mahasiswa pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan untuk memperjuangkan keseimbangan hak dan kewajiban warga negara. Melalui pendidikan tinggi, mahasiswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan kritis yang diperlukan untuk memahami dan memperjuangkan hak-hak dan kewajiban warga negara.

- 9) Mahasiswa dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh di perguruan tinggi untuk memperjuangkan keseimbangan hak dan kewajiban dalam masyarakat. Pendidikan tinggi membekali mahasiswa dengan pengetahuan teoretis dan praktis yang dapat diaplikasikan dalam aktivitas sosial untuk mempromosikan keseimbangan hak dan kewajiban.
- 10) Mahasiswa dapat mengorganisir kegiatan sosial yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban dalam masyarakat. Mahasiswa sering mengorganisir berbagai kegiatan seperti seminar, lokakarya, dan kampanye yang berfokus pada isu-isu sosial, yang dapat meningkatkan kesadaran dan mendorong tindakan kolektif untuk mencapai keseimbangan hak dan kewajiban.
- 11) Mahasiswa dapat menjadi suara bagi mereka yang tidak memiliki akses atau kesempatan untuk menyuarakan hak-hak mereka. Mahasiswa dapat menggunakan platform mereka untuk mewakili dan menyuarakan hak-hak individu atau kelompok yang kurang beruntung atau tidak memiliki akses untuk berbicara.
- 12) Mahasiswa dapat mengadvokasi kebijakan publik yang mendorong keseimbangan hak dan kewajiban dalam masyarakat. Mahasiswa dapat terlibat dalam proses advokasi kebijakan dengan menyuarakan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta mendorong legislasi yang mendukung keadilan sosial.
- 13) Mahasiswa dapat menggunakan media sosial dan teknologi informasi untuk memperjuangkan keseimbangan hak dan kewajiban warga negara. Dengan memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi, mahasiswa dapat menyebarkan informasi, mengorganisir kampanye, dan membangun jaringan untuk mendukung keseimbangan hak dan kewajiban.
- 14) Mahasiswa dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban dalam membangun masyarakat berkeadilan. Mahasiswa dapat memainkan peran edukatif dengan mengadakan penyuluhan, seminar, dan diskusi yang berjuang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban.
- 15) Mahasiswa dapat mempengaruhi budaya dan mindset masyarakat terkait keseimbangan hak dan kewajiban warga negara. Melalui kegiatan kreatif dan partisipatif, mahasiswa dapat mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakat, mengarahkan mereka untuk lebih menghargai dan melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang.

Penjelasan diatas mencakup berbagai aspek peran mahasiswa dalam memperjuangkan keseimbangan hak dan kewajiban warga negara, yang didukung oleh referensi dari berbagai

jurnal dan literatur akademik. Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha mengungkap peran penting mahasiswa dalam mendorong keseimbangan hak dan kewajiban warga negara, serta implikasi kebijakan yang dapat diambil berdasarkan temuan ini.

HASIL

Berdasarkan hasil kuesioner, terlihat bahwa semua jawaban sangat mendukung peran mahasiswa dalam menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban warga negara serta membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

Dengan persetujuan pada semua pernyataan yang menyatakan bahwa mahasiswa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perubahan dalam masyarakat, dapat menjadi agen perubahan dalam memperjuangkan hak-hak warga negara yang terabaikan, serta memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat berkeadilan, menunjukkan kesadaran akan pentingnya peran mahasiswa dalam memperjuangkan keseimbangan hak dan kewajiban dalam masyarakat.

Selain itu, dukungan terhadap partisipasi aktif mahasiswa dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan sosial, serta kemampuan mahasiswa untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh di perguruan tinggi untuk memperjuangkan keseimbangan hak dan kewajiban dalam masyarakat, menunjukkan keyakinan potensi mahasiswa sebagai agen perubahan yang signifikan.

Dengan demikian, memandang bahwa mahasiswa memiliki peran yang penting sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat, sebagai suara bagi mereka yang tidak memiliki akses atau kesempatan untuk menyuarakan hak-hak mereka, serta dalam mengadvokasi kebijakan publik yang mendorong keseimbangan hak dan kewajiban dalam masyarakat.

Dukungan mahasiswa terhadap penggunaan media sosial dan teknologi informasi oleh mahasiswa untuk memperjuangkan keseimbangan hak dan kewajiban warga negara, serta kemampuan mahasiswa untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban dalam membangun masyarakat berkeadilan, menunjukkan kesadaran mahasiswa akan beragam cara di mana mahasiswa dapat berperan dalam menciptakan perubahan positif dalam masyarakat.

Dengan demikian, keseluruhan pandangan mahasiswa menunjukkan keyakinan akan potensi mahasiswa menunjukkan keyakinan akan potensi mahasiswa sebagai agen perubahan yang dapat mempengaruhi budaya dan mindset masyarakat terkait keseimbangan hak dan kewajiban warga negara.

DISKUSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi relevansi mahasiswa IAIN Palangkaraya terhadap keseimbangan hak dan kewajiban warga negara dalam membangun masyarakat yang berkeadilan. Pendidikan tinggi berperan penting dalam membentuk karakter dan pemahaman mahasiswa mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan di IAIN Palangkaraya menjadi penting untuk menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan memanfaatkan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Responden diminta untuk memberikan pendapat setuju atau tidak terhadap berbagai pernyataan yang dibuat oleh penulis mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa IAIN Palangkaraya memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Mereka menyadari bahwa hak tanpa diiringi dengan kewajiban dapat menyebabkan ketimpangan sosial. Sebaliknya, kewajiban tanpa hak dapat menimbulkan ketidakadilan. Mahasiswa juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial, seperti seminar, diskusi publik, dan program pengabdian masyarakat. Yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang hak dan kewajiban warga negara.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pendidikan kewarganegaraan di IAIN Palangkaraya efektif dalam membentuk sikap dan perilaku mahasiswa yang mendukung terciptanya masyarakat yang adil dan seimbang. Mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis dan bertindak secara etis dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka. Dengan demikian, mereka diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang mampu mempromosikan keadilan sosial di lingkungan mereka.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa memiliki peran yang sangat relevan dalam menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban warga negara dalam membangun masyarakat berkeadilan. Mahasiswa memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Melalui pendidikan tinggi dan pengetahuan yang mereka peroleh, mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perubahan positif dalam menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban negara.

Partisipasi aktif mahasiswa, baik melalui gerakan sosial, kegiatan sosial, atau advokasi kebijakan, dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Mereka

dapat menjadi suara bagi mereka yang tidak memiliki akses atau kesempatan untuk menyuarakan hak-hak mereka. Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat berkeadilan. Dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh di perguruan tinggi, mereka dapat memainkan peran sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban.

Melalui pendidikan tinggi, mahasiswa memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan untuk memperjuangkan keseimbangan hak dan kewajiban warga negara. Mereka dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan ini untuk mengadvokasi kebijakan publik yang mendorong keseimbangan hak dan kewajiban dalam masyarakat.

Dalam rangka membangun masyarakat berkeadilan, peran mahasiswa sangat penting. Melalui partisipasi aktif, advokasi, dan penggunaan pengetahuan yang mereka peroleh, mahasiswa dapat membantu menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban warga negara. Dengan demikian, keterlibatan mahasiswa dalam membangun masyarakat berkeadilan sangat relevan dan penting.

DAFTAR REFERENSI

- Aulia, M., Misnawati, M., Apritha, A., Setyoningsih, R. A., Handayani, P., & Saptaniarsih, W. (2023). Pelajar Pancasila Pada Abad Ke-21 Di SMAN 1 Palangka Raya. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 2(1), 134-151.
- Drs. H. Mahpudin Noor M.Si, Suparman M.Ag., Pancasila, Jln. BKR (Lingkar Selatan), 2016.
- Fadila, R. I., & Purba, N. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Asisten Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. *Citra Justicia: Majalah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 22(1), 94–102. <https://doi.org/10.36294/cj.v22i1.2108>
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa. *Dih Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25).
- Halimah, H., Misnawati, M., Lestaringtyas, S. R., Mingvianita, Y., Sepmiatie, S., & Suryatini, R. I. (2023). Implementasi Pancasila Sebagai Entitas Dan Identitas Pendidikan Abad Ke-21 di SMAN 4 Palangka Raya. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 2(1), 119-133.
- Hariyadi, H., Misnawati, M., & Yusrizal, Y. (2023). Mewujudkan Kemandirian Belajar: Merdeka Belajar Sebagai Kunci Sukses Mahasiswa Jarak Jauh. *BADAN PENERBIT STIEPARI PRESS*, 1-215.
- Hartaka, I. M., & Suadnyana, I. B. P. E. (2020). Dharma Agama Dan Dharma Negara Di Era Kekinian. *Pariksa*, 2(1).

Pendidikan Kewarganegaraan. (2001). Indonesia: Gramedia Pustaka Utama.

Putri, D. P., & Suminar, T. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Pada Desa Wisata “Kampung Kokolaka” Kelurahan Jatirejo Kota Semarang. *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 3(2), 34-44.

Putri, G. E., Misnawati, M., Syahadah, D., Sari, Y., Ummy, R., & Nurfitria, I. (2023). Pengamalan Nilai Profil Pelajar Pancasila Dalam Proses Pembelajaran Pada Era Digital Di SMPN 6 Palangka Raya. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 2(1), 171-190.

Yasin, J. (2009). Hak Asasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia. Bandung Islamic University.